

Efektivitas Bahasa Indonesia dalam Mengkomunikasikan Kebijakan Zakat, Wakaf, dan Keuangan Syariah Pemerintah

Amelia Pratama¹, Putri Melani², Sundawati Tisnasari³

^{1,2,3}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

E-mail: 5554230083@untirta.ac.id¹, 5554230103@untirta.ac.id²,
sundawati_tisnasari@untirta.ac.id³

Article Info

Article history:

Received December 17, 2025

Revised December 19, 2025

Accepted December 24, 2025

Keywords:

Linguistic Clarity, Islamic Economic Policy, Zakat, Waqf, Islamic Financial Literacy, Policy Communication

ABSTRACT

The purpose of this study is to evaluate how well government policies regarding zakat, waqf, and Islamic finance can be communicated in Indonesian. This study summarizes research on communication practices, Islamic financial terminology literacy, message framing techniques, and linguistic difficulties in the digital age using a descriptive literature review method. The findings show that improving public comprehension and involvement in Islamic economic policies depends heavily on linguistic clarity. The public's adoption of Islamic financial services may be hampered, policy dissemination may be less effective, and ambiguity may result from the use of technical Islamic terms without contextual explanation. On the other hand, it has been demonstrated that communicative, consistent, and easily comprehensible language enhances public trust and facilitates the execution of policies. This study emphasizes that the ability of government institutions and stakeholders to create and deliver messages using precise, understandable, and context-appropriate language is critical to the efficacy of Islamic economic policy communication

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received December 17, 2025

Revised December 19, 2025

Accepted December 24, 2025

Kata Kunci:

Efektivitas Bahasa, Kebijakan Ekonomi Syariah, Zakat, Wakaf, Literasi Syariah, Komunikasi Kebijakan

ABSTRACT

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif Bahasa Indonesia digunakan untuk berkomunikasi tentang kebijakan zakat, wakaf, dan keuangan syariah pemerintah. Penelitian ini mensintesis berbagai hasil tentang praktik komunikasi, literasi istilah syariah, strategi framing pesan, dan masalah bahasa di era digital. Penelitian ini menggunakan metode review literatur deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahasa yang jelas merupakan komponen penting dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan ekonomi syariah. Penggunaan istilah teknis syariah yang tidak disertai dengan penjelasan yang cukup dapat menyebabkan keraguan, menghambat sosialisasi, dan menghambat adopsi layanan keuangan syariah. Sebaliknya, telah terbukti bahwa penggunaan bahasa yang komunikatif, konsisten, dan mudah dipahami meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong pelaksanaan kebijakan. Menurut penelitian ini, keberhasilan komunikasi kebijakan ekonomi syariah bergantung pada kemampuan lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan untuk membuat dan menyampaikan pesan dengan cara yang jelas, tepat, dan relevan.



Corresponding Author:

Amelia Pratama
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
E-mail: 5554230083@untirta.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia menjadikan pengembangan ekonomi syariah termasuk kebijakan zakat, wakaf, dan layanan keuangan syariah sebagai salah satu prioritas pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah dan lembaga terkait (OJK, BAZNAS, BWI, perbankan syariah) telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program untuk mengoptimalkan pemanfaatan instrumen-instrumen tersebut dalam upaya pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pembangunan sosial. Namun keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain regulasi dan mekanisme institusional, melainkan juga oleh efektivitas **komunikasi kebijakan** kepada publik. Penyampaian kebijakan yang jelas, mudah dicerna, dan sesuai kaidah kebahasaan sangat menentukan sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam program-program ekonomi syariah (Indah Puji Amalia, 2023).

Berbagai studi empiris menyoroti masalah literasi zakat dan wakaf yang masih terbatas pada segmen masyarakat tertentu, sehingga potensi penghimpunan dan pemanfaatan ZISWAF (zakat, infaq, sedekah, wakaf) belum optimal. Penelitian terkini menunjukkan adanya kebutuhan peningkatan literasi dan sosialisasi termasuk pemanfaatan media digital sebagai upaya meningkatkan partisipasi publik dalam program zakat dan wakaf. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa aspek komunikasi dan literasi merupakan variabel kunci yang memengaruhi efektivitas kebijakan filantropi Islam di Indonesia (Fitri Yenti, 2023).

Dari perspektif kebahasaan, penggunaan istilah teknis syariah (mudharabah, musyarakah, wakaf produktif, akad, dsb.) yang berasal dari bahasa Arab dan diindonesiasikan sering menimbulkan ambiguitas atau kesalahpahaman bila tidak disertai penjelasan kontekstual yang memadai. Selain itu, strategi retorik dan framing pesan yang dipilih oleh pemerintah atau lembaga filantropi dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap legitimasi dan urgensi kebijakan. Meski demikian, kajian yang mengkaji peran Bahasa Indonesia secara linguistik dalam konteks penyampaian kebijakan zakat, wakaf, dan keuangan syariah masih relatif terbatas dan cenderung terfragmentasi antara studi komunikasi, kajian literasi, dan analisis kebijakan (Risna Hairani Sitompul, 2023).

Perkembangan digitalisasi penghimpunan dan distribusi ZISWAF (platform *fintech* zakat, e-wakaf, aplikasi perbankan syariah) membuka peluang sekaligus tantangan baru bagi praktik komunikasi kebijakan. Di satu sisi, kanal digital memungkinkan jangkauan pesan yang lebih luas; di sisi lain, pesan yang disajikan secara singkat (*microcopy*), otomatisasi, atau terjemahan istilah teknis tanpa adaptasi kebahasaan yang tepat dapat menurunkan efektivitas pemahaman publik. Oleh karena itu, evaluasi efektivitas bahasa Indonesia dalam konteks komunikasi

kebijakan ekonomi syariah harus mempertimbangkan format media (offline vs digital), pilihan istilah, dan strategi framing yang digunakan (Risna Hairani Sitompul, 2023).

Berdasarkan kerangka masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa efektif Bahasa Indonesia digunakan dalam komunikasi kebijakan zakat, wakaf, dan keuangan syariah pemerintah dengan fokus pada aspek klaritas istilah, framing pesan, dan kecocokan kanal komunikasi terhadap audiens sasaran. Kajian ini mengintegrasikan pendekatan analisis wacana kritis (untuk menelaah strategi retorik dan framing), kajian terminologi (untuk menilai pemahaman istilah), serta survei empiris terhadap penerima pesan/publik (untuk mengukur outcome pemahaman dan sikap). Pendekatan multidisipliner ini diharapkan menutup celah antara studi linguistik dan studi kebijakan ekonomi syariah (Sofiah, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan *descriptive literature review* (kajian pustaka deskriptif) yang bertujuan mendeskripsikan dan mensintesis temuan-temuan penelitian serta dokumen kebijakan terkait penggunaan Bahasa Indonesia dalam komunikasi kebijakan zakat, wakaf, dan keuangan syariah. Pendekatan ini dipilih karena fokus studi adalah memetakan bukti empiris, praktik komunikasi, dan isu-isu kebahasaan yang muncul pada literatur dan dokumen kebijakan (naratif-deskriptif), bukan melakukan meta-analisis kuantitatif. Pendekatan *narrative/descriptive review* dipandang tepat untuk menghasilkan gambaran komprehensif dan identifikasi gap penelitian (Javeed Sukhera, 2022). Kriteria inklusi penelitian ditetapkan sebagai berikut:

1. Publikasi ilmiah (artikel jurnal, prosiding terakreditasi, laporan penelitian) dan dokumen kebijakan terkait zakat, wakaf, atau keuangan syariah.
2. Terbit dalam rentang waktu 2020 - 2025 (maksimal 5 tahun terakhir) untuk memastikan relevansi perkembangan digitalisasi dan kebijakan terbaru.
3. Mengkaji aspek komunikasi, literasi, terminologi, framing kebijakan, atau strategi sosialisasi dalam konteks Indonesia.
4. Tersedia teks lengkap dan dapat diakses melalui basis data atau repositori akademik (Google Scholar, Garuda, jurnal universitas, atau situs lembaga).

Beberapa penelitian dan laporan nasional yang membahas literasi zakat atau wakaf dan digitalisasi juga dimasukkan sebagai bahan kontekstual karena relevansi kebijakan misalnya studi indeks literasi, laporan BWI/BAZNAS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Bahasa Indonesia sebagai Alat Komunikasi

Bahasa Indonesia telah diajarkan sebagai mata pelajaran wajib sejak tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Penetapan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjadikan Bahasa Indonesia sebagai sarana pemersatu berbagai suku, budaya, dan identitas di Indonesia. Dalam konteks akademik, Bahasa Indonesia berfungsi sebagai pedoman untuk menyusun dan

menggunakan bahasa secara baik dan benar. Pembelajaran bahasa di perguruan tinggi pada dasarnya memiliki prinsip yang sama dengan pembelajaran di sekolah menengah, namun cakupan materi dan bentuk komunikasinya lebih mendalam dan bersifat analitis (Ayu Purnamasari S, 2023). Menurut Hartati dkk. (2024) menegaskan bahwa bahasa merupakan elemen yang sangat penting dalam komunikasi. Tanpa bahasa, interaksi sosial akan terhenti sehingga kehidupan masyarakat tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Bahasa juga berfungsi sebagai media pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya, menjaga kesinambungan nilai dan tradisi suatu bangsa. Lebih dari sekadar alat bertukar pesan, bahasa memengaruhi cara manusia memahami dan merespons berbagai fenomena, mulai dari kejadian sehari-hari, fenomena alam, hingga hasil budaya dan karya manusia. Menurut Mailani dkk. (2022) menyatakan bahwa bahasa adalah sarana komunikasi paling efektif untuk menyampaikan pesan, ide, perasaan, dan tujuan kepada orang lain, sehingga memungkinkan terjadinya kerja sama antarmanusia. Sejalan dengan itu, Naiborhu dkk. (2025) menekankan bahwa Bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Bahasa Indonesia membantu masyarakat memahami serta menginternalisasi nilai dan norma yang berkaitan dengan identitas kebangsaan. Efektivitas bahasa dalam komunikasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan berbahasa individu, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kualitas pendidikan bahasa, pengaruh media sosial, pemahaman konteks sosial-budaya, kesadaran berbahasa, ketepatan dalam memaknai pesan, serta keterampilan menulis maupun berbicara.

Sebagai bahasa nasional dan sekaligus *lingua franca* di Indonesia, Bahasa Indonesia memegang peranan signifikan tidak hanya sebagai alat komunikasi sehari-hari, tetapi juga sebagai fondasi yang menguatkan hubungan sosial serta aktivitas ekonomi di tengah masyarakat yang majemuk (Arifin dkk., 2024). Jannah dan Subhan (2024) menegaskan bahwa bahasa memiliki fungsi sentral dalam kehidupan manusia, baik sebagai media komunikasi maupun sebagai sarana penyampaian informasi, ide, serta nilai-nilai budaya. Dalam lingkup global, bahasa menjadi faktor penting yang memengaruhi interaksi antar negara, khususnya dalam bidang ekonomi. Sebagai bahasa resmi negara, Bahasa Indonesia memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam dinamika ekonomi internasional. Bahasa ini juga berperan strategis dalam memfasilitasi komunikasi perdagangan global serta meningkatkan daya saing produk nasional. Sejalan dengan arus globalisasi, Bahasa Indonesia terus bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi dan ekonomi modern, sehingga tetap relevan dan mampu menjadi identitas bangsa yang menggerakkan berbagai aspek kehidupan nasional.

Peran Bahasa dalam Kegiatan Ekonomi Syariah

Literatur ekonomi syariah dan studi literasi menemukan bahwa penguasaan terminologi ekonomi syariah dan bahasa ekonomi mempengaruhi partisipasi masyarakat misalnya keputusan membayar zakat melalui kanal digital atau memilih produk pembiayaan syariah (e.g., sukuk, pembiayaan mudharabah). Studi kuantitatif pada literasi zakat menemukan korelasi positif antara tingkat literasi (termasuk pemahaman istilah) dan minat menggunakan zakat digital. Selain itu, bahasa ekonomi yang tepat juga mempengaruhi persepsi profesionalitas dan kredibilitas lembaga pengelola (Yuanita Nur Anggraini, 2022).

Dalam aktivitas ekonomi, bahasa (terminologi, klausa kontraktual, label produk) bukan sekadar alat deskriptif tetapi juga membentuk ekspektasi ekonomi misalnya risiko atau imbalan, hak & kewajiban. Ketika istilah-istilah syariah digunakan tanpa terjemahan/penjelasan, audiens non-spesialis menghadapi hambatan kognitif yang mengurangi willingness-to-pay atau willingness-to-participate. Di samping itu, istilah yang tidak seragam antar-lembaga dapat menimbulkan friksi pasar misalnya perbedaan definisi wakaf produktif. Literatur menunjukkan kebutuhan glosarium istilah ekonomi syariah berbahasa Indonesia untuk memperjelas transaksi dan meningkatkan kepercayaan pengguna (Yuanita Nur Anggraini, 2022).

Pentingnya Kejelasan Bahasa dalam Penyampaian Kebijakan Ekonomi Syariah

Sangat penting untuk menggunakan bahasa yang jelas saat menyampaikan kebijakan ekonomi syariah untuk memastikan transparansi, pemahaman, dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat atau terdampak. Pilihan kata yang tepat, struktur kalimat yang sistematis, dan frase khas syariah yang jelas dalam kontrak seperti mudharabah membantu menjaga transparansi dan keadilan antara pihak pemberi modal dan pengelola, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian *Linguistic Clarity in Mudharabah Contracts: Ensuring Transparency and Fairness in Indonesian Islamic Financial Institutions* (Zaidi, 2024).

Selain itu, dalam hal literasi keuangan publik, studi *Penyuluhan Literasi Istilah Keuangan Syariah dalam Bahasa Indonesia yang Mudah Dipahami Masyarakat* menemukan bahwa banyak istilah ekonomi dan keuangan syariah berakar pada bahasa Arab atau istilah teknis Islam, membuatnya sulit dipahami oleh masyarakat umum. Akibatnya, penyuluhan yang diberikan dalam bahasa Indonesia yang sederhana dan komunikatif sangat penting untuk memastikan bahwa informasi tentang produk dan kebijakan syariah dapat diakses dengan mudah (Ardhani et al., 2025).

Kejelasan terminologi dan definisi juga sangat penting dari sudut pandang kebijakan makro dan regulasi. Dalam *Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2023*, yang diterbitkan oleh institusi resmi, ekonomi syariah didefinisikan sebagai suatu sistem yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan data statistik yang lengkap untuk mencapai keberlanjutan, kesejahteraan sosial, dan efisiensi ekonomi. Agar pemangku kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat umum dapat memahami implementasi dan evaluasi kebijakan syariah, konsep dan definisi seperti ini harus dikomunikasikan dengan jelas (Keuangan, 2023).

Ketidakjelasan bahasa, seperti kalimat terlalu teknis, penggunaan istilah asing tanpa penjelasan, atau struktur penyampaian yang kompleks, dapat menghambat pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah dan bahkan dapat menyebabkan penolakan atau salah tafsir kebijakan. Hal ini dapat membahayakan kepercayaan publik dan mengurangi kinerja kebijakan syariah sebagai alat ekonomi dan sosial. Akibatnya, dalam pembuatan kebijakan, kontrak, peraturan, dan materi sosialisasi, elemen bahasa harus dipertimbangkan. Ini termasuk pemilihan istilah, struktur kalimat, penggunaan bahasa nasional yang mudah dipahami, dan penjelasan sistematis tentang istilah teknis.

Oleh karena itu, kejelasan bahasa bukan hanya masalah estetika akademik, tetapi juga dasar dari kebijakan ekonomi syariah yang efektif, yang memastikan transparansi, keadilan, inklusi, dan kepercayaan publik. Pembuat kebijakan, institusi keuangan syariah, dan akademisi

seyogianya bekerja sama untuk membuat dokumen dan komunikasi kebijakan yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh masyarakat dari berbagai latar belakang.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian literatur dan analisis wacana tentang dokumen kebijakan yang berkaitan dengan zakat, wakaf, dan keuangan syariah, dapat disimpulkan bahwa komunikasi kebijakan ekonomi syariah pemerintah harus disampaikan dengan sukses dalam bahasa Indonesia. Terbukti bahwa pemahaman, penerimaan, dan keterlibatan masyarakat dipengaruhi oleh kejelasan bahasa, yang mencakup istilah yang tepat, struktur pesan yang koheren, dan kesesuaian antara media sosialisasi dan demografi audiens. Jika istilah teknis syariah digunakan tanpa penjelasan kontekstual, itu dapat menimbulkan ambiguitas dan menghambat pemahaman publik, terutama di era digital, di mana informasi disampaikan dengan lebih singkat. Selain itu, bahasa yang tidak seragam di antara lembaga dapat menyebabkan ketidaksepakatan dan ketidaksepakatan dalam pelaksanaan kebijakan.

Menurut literatur, bahasa yang digunakan harus komunikatif, sederhana, dan dilengkapi dengan penjelasan yang sistematis tentang istilah teknis akan membuat masyarakat lebih mudah memahami kebijakan dan layanan keuangan syariah. Strategi yang diperlukan untuk meningkatkan inklusi dan kepercayaan publik adalah meningkatkan literasi bahasa dan menyederhanakan materi sosialisasi, terutama di platform digital. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kejelasan bahasa bukan hanya aspek teknis bahasa; itu adalah dasar penting untuk menciptakan kebijakan ekonomi syariah yang transparan, tanggung jawab, dan efektif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Purnamasari S, W. J. (2023). Pentingnya Penggunaan Bahasa Indonesia Di Perguruan Tinggi. *Jotika Journal in Education*, 57-67.
- Fitri Yenti, S. I. (2023). Analisis Tingkat Literasi Zakat Dan Wakaf Masyarakat Sumatera Barat Berdasarkan Standar Indeks Literasi Zakat (Ilz) Dan Indeks Literasi Wakaf (Ilw). *Open Journal Systems*, 1099-1110. doi:<https://doi.org/10.33578/mbi.v17i6.235>
- Hartati, W. R. (2024). Peran Bahasa dalam keseharian. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 335-338.
- Indah Puji Amalia, A. R. (2023). Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah. *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics*, 1-15.
- Javeed Sukhera, M. P. (2022). Narrative Reviews: Flexible, Rigorous, and Practical. *Journal of Graduate Medical Education*, 414-417.
- Mailani, O. N. (2022). Bahasa Sebagai Alat Komunikasi Dalam Kehidupan Manusia. *KAMPRET Journal*, 5-7.
- Naiborhu, R. N. (2025). Bahasa Indonesia sebagai Alat Komunikasi yang Efektif dalam Meningkatkan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8092-8094.
- Risna Hairani Sitompul, R. H. (2023). Optimalisasi Pemberdayaan Literasi Wakaf Berbasis. *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management*, 253-268.

- Sofiah, A. F. (2024). Strategi komunikasi Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam meningkatkan pelayanan terhadap nasabah. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, (MIJ) eISSN: 3024-8140.
- Yuanita Nur Anggraini, R. I. (2022). Analisis Pengaruh Literasi Zakat Dan Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Melalui Zakat Digital Pada Masyarakat Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 54-66.
- Ali, S., Ahmad, H., & Padangsidempuan, A. (2023). *Optimalisasi Pemberdayaan Literasi Wakaf Berbasis Kontent Digital Society 5 . 0. 4*, 253–268.
- Amalia, I. P., & Rama, A. (2023). *Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat , Infaq , dan Sedekah*. 3(1), 1–15.
- Ardhani, R. A., Prianto, H., Deviga, L., & Diliyana, Y. F. (2025). Syariah Dalam Bahasa Indonesia Yang Mudah Dipahami Masyarakat. 7, 75–89.
- Batusangkar, I. (2023). 1 , 2 1,2. 17(1978), 1099–1110.
- Fadila, N., & Soumena, F. Y. (2025). *Sinergi Pemerintah Dan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Peningkatan Literasi Ekonomi Islam*. 3, 56–86.
- Keuangan, E. D. A. N. (2023). *EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH INDONESIA 2023*.
- Pemerintah, E. (2025). *Argopuro: Jurnal Multidisiplin Ilmu Bahasa*. 11(6).
- Sofiah, A. F. (2024). Strategi komunikasi Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam meningkatkan pelayanan terhadap nasabah. 2(12), 1465–1472.
- Sukhera, J. (2022). *Narrative Reviews : Flexible , Rigorous , and Practical*. August, 414–417. <https://doi.org/10.1016/j.hlc.2018.03.027>
- Wardani, I., & Subhan, R. (2024). *Bahasa Indonesia Sebagai Alat Komunikasi Yang Efektif*. 7538–7550.
- Zaidi, M. (2024). *Linguistic Clarity In Mudharabah Contracts : Ensuring Transparency And Fairness In Indonesian Islamic Financial Institutions*. 12(2), 708–722.